

PERAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN MANAJEMEN DALAM KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK

Suryo Pratolo

E-mail : suryo@umy.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Regional autonomy that has long been the aspiration of the people had been executed after successfully fought for reform. After implemented, which should be considered is whether the regional autonomy that has been running for 4 yaers really can fullfil people's needs and create welfare for the people. We all know that the purpose of the existence of local government is creating public service. Public services must be created with the creative way through many aspect include regional financial management strategies. By using four independent variables: financing ability, mobilize funds ability, regional government independence, level of fiscal decentralization, and the level of flaypa per effect, researcher tested the role of regional autonomy by linking it to the influence of these four independent variables on the variable of public service expenditure allocation. By using a chow test resulted in a finding that the local government system and the personnel in the four years of implementation of regional autonomy tend looks not ready in achieving the vision of regional autonomy. Anoth-erfinding is that in general, regional autonomy has a role in improving the influence of financial management aspects on the allocation of expenditure on public services.

Keywords: Regional Otonoy, Public Services, Regional, Financial Management, Reformation.

PENDAHULUAN

Tujuan utama penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keefektifan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sistem sentralisasi yang diterapkan sebelumnya dianggap sebagai faktor penyebab rendahnya pelayanan publik di daerah karena adanya beberapa faktor. Pertama, prioritas pelayanan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, maka seringkali

program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya, sebuah daerah terpencil yang lebih membutuhkan pelayanan berupa akses jalan untuk menembus wilayah yang terisolasi, seringkali terpaksa harus membangun "gedung pasar" karena program pemerintah pusat mengarahkan demikian. Kedua, sentralisasi seringkali memperlambat pembangunan infrastruktur sosial dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi daerah. Ketiga, akuntabilitas terhadap pelayanan oleh

pemerintah daerah menjadi rendah karena pemerintah daerah lebih memiliki akuntabilitas kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada masyarakat yang dilayani. Rendahnya akuntabilitas terhadap masyarakat yang dilayani menyebabkan pemerintah daerah tidak memperhatikan mutu pelayanan, keefektifan maupun efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. (STAN, 2007). Dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan pelayanan publik dengan bertopang pada sumber pendapatan daerah yang utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menunjang kehidupan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien (Agus, 2004).

Pelayanan publik sebagai kewajiban pemerintahan daerah tidak terlepas dari aspek anggaran sebagai alat strategi pembangunan. Kebijakan alokasi anggaran pemerintahan daerah merupakan salah satu penentu efektivitas dan efisiensi pelayanan bulik. Alokasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur yang dimaksud adalah belanja yang manfaatnya dinikmati oleh publik secara tidak langsung, namun langsung dinikmati oleh

para aparatur. Belanja pelayanan publik adalah belanja yang dinikmati oleh publik secara langsung. Belanja pegawai yang bersifat tidak langsung dan belanja-belanja yang masuk dalam kategori belanja rutin dapat dikategorikan sebagai belanja aparatur sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat langsung atau belanja yang masuk dalam kategori belanja pembangunan dapat diklasifikasikan sebagai belanja pelayanan publik. Selama tiga tahun setelah penerapan otonomi daerah, proporsi belanja pelayanan publik yang diprosikan dengan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja pada 5 propinsi di Pulau Jawa sebagai barometer pelayanan publik pada tahun 2002 disajikan pada Tabel 1.

Dari sisi prosentase belanja pelayanan publik yang diprosikan dengan belanja pembangunan dibandingkan dengan total belanja, dari kelima propinsi di Jawa tersebut menunjukkan Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi yang cenderung memberikan pelayanan publik yang baik yang ditunjukkan angka di atas 50%, sedangkan empat propinsi yang lain menunjukkan alokasi belanja pelayanan publik yang belum berimbang dengan belanja aparatur yang ditunjukkan dengan angka di bawah 50%.

Tabel 1.
Prosentase Belanja Pelayanan Publik Propinsi Di Jawa Tahun 2002

Propinsi	Belanja Publik	Total Belanja	Prosentase Belanja Publik
DKI Jakarta	3.628.875.250.000	9.349.030.200.000	39%
Jawa Barat	782.668.250.000	2.251.753.190.000	35%
Jawa Tengah	621.640.310.000	1.923.271.770.000	32%
DIY	92.858.970.000	452.184.420.000	21%
Jawa Timur	1.331.542.120.000	2.404.434.640.000	55%

Sumber: direktorat jenderal perimbangan keuangan, data dioah.

Faktor tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti mengapa tidak semua pemerintahan daerah memiliki alokasi belanja

Pengelolaan keuangan daerah yang didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan suatu instrumen untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah untuk mendukung dilaksanakannya pelayanan publik. Secara logis, apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara baik akan mampu mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good government governance* yaitu: partisipatif, hukum ditegakkan, transparan, adil, responsif, memiliki visi yang jelas, akuntabel, dilakukan supervisi, efisien dan efektif, dan profesional.

Penelitian ini menguji hubungan antara variabel-variabel independen yang merupakan proksi dari pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kemampuan pembiayaan daerah, kemampuan mobilisasi dana, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal, dan *flypaper effect* dengan variabel dependen berupa alokasi belanja pelayanan publik yang diprosikan dengan prosesntase belanja pembangunan atau belanja langsung. Selanjutnya, peran otonomi daerah akan ditinjau lebih dalam terkait dengan hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan alokasi belanja pelayanan publik tersebut. Diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan fenomena terkait dengan alokasi belanja pelayanan publik yang secara umum

pelayanan publik di atas 50% padahal tujuan eksistensi pemerintahan daerah yang utama adalah pelayanan publik.

belum optimal dimana alokasi belanja cenderung lebih besar pada belanja aparatur baik pada era otonomi daerah pada saat ini maupun era sentralisasi sebelumnya ditinjau dari aspek pengelolaan daerah yang dilakukan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Organisasi

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Organisasi yang merupakan suatu teori mengenai fungsi organisasi dan bagaimana organisasi tersebut beroperasi (Jones, 1993). Teori organisasi menyatakan bahwa suatu organisasi merupakan kumpulan dari beberapa pihak yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintahan daerah sebagai organisasi memenuhi kriteria apa yang ada pada teori organisasi tersebut. Pemerintahan daerah merupakan kumpulan beberapa pihak baik orang maupun sistem dan sub sistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yang utama adalah memberikan pelayanan publik.

Teori Agensi

Teori perantara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Berdasarkan Teori Agensi, pada suatu organisasi timbul suatu hubungan keagenan. Hubungan keagenan timbul manakala pihak prinsipal (pemberi amanah) memberikan amanah kepada agen (pihak yang diberi amanah) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang

diharapkan. Pemerintah daerah selaku agen untuk mengelola pemerintahan daerah harus bisa memenuhi amanah dari prinsipal (rakyat) yang telah mempercayainya untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Di lain pihak, Teori Agensi juga menyatakan bahwa setiap orang baik sebagai prinsipal maupun sebagai agen cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi (Jensen dan Meckling, 1976: 308).

Logika tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena mengapa pelayanan publik baik sebelum maupun setelah otonomi daerah dirasakan belum optimal. Dimungkinkan timbul masalah keagenan dalam organisasi pemerintahan daerah dimana pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi amanah prinsipal cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan agen.

Sebagai teori terapan, Teori Kontrak mengungkapkan teori tentang hubungan kontrak kerjasama antara prinsipal dengan agen dalam pengelolaan organisasi (Watts and Zimmerman, 1986; Messier. Jr, 2006). Berdasarkan teori kontrak, konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan agen kepada organisasi dapat dicapai dengan adanya hubungan kontraktual yang jelas. Dalam hal ini kontrak antara pemerintah daerah dengan rakyat harus dituangkan pada peraturan perundangan yang disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Permasalahan selanjutnya adalah bahwa kontrak lebih mengatur pada aspek sistem sedangkan masih ada satu faktor lagi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi yaitu aspek personil yang diharapkan diketahui dari penelitian ini.

Penetapan teori-teori di atas berkaitan dengan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai bentuk keamanan pemerintah daerah secara logika akan mendorong kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan alokasi belanja publik yang relatif semakin besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Perumusan hipotesis pada penelitian ini merupakan suatu proses deduktif. Hipotesis yang dibangun dari proses deduksi perlu diuji secara empiris yang dengan demikian di dalam penelitian ini terdapat aktivitas yang disebut dengan *deducto hipotetico verificative* (Herman Soewardi, 2000).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, sedangkan pada sisi kepentingan pemerintah daerah otonomi daerah ditujukan untuk (Smith Basuki, 2002) :

- 1) Mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

- berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- 2) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat daerah.
 - 3) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Salah satu aspek penting dalam suatu pembangunan daerah adalah aspek pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005). Pengertian keuangan daerah tersebut diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai peraturan yang ditetapkan.

- 2) Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Keuangan daerah merupakan aspek yang mendukung keberhasilan program dan kegiatan yang menjadi amanah untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik. Kondisi keuangan daerah ditentukan oleh pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan kondisi yang baik dalam hal kemampuan pembiayaan daerah, kemampuan mobilisasi dana, tingkat kemandirian pemerintahan daerah, desentralisasi fiskal, dan kondisi *flypaper effect*.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan tersebut bersumber dari lebih sisa perhitungan anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional

yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen pertahanan negara. Secara teoritik, upaya mobilisasi daerah dapat dilakukan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Pola intensifikasi merupakan peningkatan pendapatan dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik, baik itu pada sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah. Sedangkan pola ekstensifikasi merupakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun usaha-usaha lainnya yang sah (Abdul, 2001).

Pada sisi kemandirian pemerintah daerah, pada umumnya kekuatan APBD terlalu tergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintahan pusat untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana yang berasal dari PAD. Dengan semakin meningkatnya PAD, maka meningkatkan pula kemampuan daerah untuk membiayai belanja rumah tangganya dan pada akhirnya diharapkan daerah akan semakin mandiri dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan dan subsidi oleh pemerintahan pusat.

Sumber keuangan daerah antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi dari suatu daerah yang bersangkutan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Transfer pemerintah pusat yang diistilahkan secara khusus menjadi dana perimbangan meliputi:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu dalam arti daerah menggunakan atau mengalokasikan penggunaannya sesuai kemauan atau kehendak daerah yang bersangkutan.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan jasa-jasa publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pembahasan mengenai dana perimbangan dan PAD berhubungan dengan tekanan fiskal. Menyitir pendapat Yohanes (2007), tekanan fiskal daerah dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan anggarannya. Kondisi perekonomian daerah, siklus bisnis dan faktor politik dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal pada pemerintah daerah. Tekanan fiskal pada suatu daerah dapat dicerminkan dari nilai upaya pajak di daerah. Upaya pajak adalah rasio besarnya pajak yang dikumpulkan daerah terhadap kapasitas pajak di daerah itu. Upaya pajak ini menunjukkan usaha pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya. Pemerintah yang menghadapi tekanan fiskal tinggi akan berupaya meningkatkan pendapatnya dengan menggali potensi pajak daerah. Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi tekanan fiskal. Daerah yang tidak mampu membuat solusi atas tekanan fiskal akan mengalami *flypaper effect* yaitu suatu kondisi

dimana pemerintah daerah mendanai belanja daerah dengan menggunakan transfer atau dana perimbangan dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan menggunakan kemampuan sendiri (Mutiara, 2007). Tujuan utama adanya dana perimbangan adalah mengurangi ketidakseimbangan fiskal baik secara vertikal maupun secara horisontal. Ketidakseimbangan fiskal secara vertikal disini dimaksudkan penerimaan pemerintahan daerah yang berasal dari daerah sendiri tidak mampu mencukupi dalam menutup biaya penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat lokal, sedangkan ketidakseimbangan fiskal secara horisontal dimaksudkan bahwa suatu pemerintahan daerah bisa jadi mempunyai basis pajak lokal yang jauh lebih besar daripada daerah-daerah lain. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa dana perimbangan akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan dana perimbangan itu sendiri (Turnbull dalam Haryo, 2007).

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan fiskal oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dalam desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber keuangannya sendiri dengan tetap didukung perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan definisi operasional terkait dengan variabel-variabel penelitian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap prioritas pelayanan publik.***
- H₂: Otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh kemampuan mobilisasi dana daerah terhadap prioritas pelayanan publik.***
- H₃: Otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap prioritas pelayanan publik.***
- H₄: Otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh tingkat desentralisasi fiskal terhadap prioritas pelayanan publik.***
- H₅: Otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh flypaper effect terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.***

METODE PENELITIAN

Populasi dan Data Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah empat kabupaten dan satu kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian sensus karena seluruh elemen dari populasi diteliti.

Data yang digunakan berupa data sekunder berupa angka-angka yang ada pada laporan keuangan pemerintahan daerah yang diungkapkan pada publikasi buku laporan statistik keuangan tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Realisasi APBD periode 4 tahun sebelum otonomi daerah yaitu periode tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan periode tahun anggaran 2000/2001 dan periode 4 tahun sesudah otonomi daerah yaitu periode tahun anggaran 2001 sampai dengan periode tahun anggaran 2004.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data tentang Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sebelum dan sesudah otonomi daerah akan diperoleh dari laporan statistik keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja publik yang diprosikan dengan prosentase belanja pembangunan diukur dengan menggunakan rasio total belanja pembangunan (BPB) terhadap total APBD.

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) **Kemampuan Pembiayaan Daerah** yang diukur dengan rasio PAD terhadap Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai (BRNP).

- 2) **Kemampuan Mobilisasi Daerah** yang diukur dengan rasio Pajak Daerah (TD) terhadap PAD.
- 3) **Tingkat Kemandirian Pemerintah** yang diukur menggunakan rasio PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (TPDTS).
- 4) **Desentralisasi Fiskal** yang diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).
- 5) **Flypaper Effect** yang diukur dengan menggunakan rasio DAU terhadap PAD.

Uji Kualitas Data

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis yang ditujukan untuk menjamin bahwa model regresi yang dibangun menghasilkan *estimator* linear yang tidak bias. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

- 1) Uji Normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$ maka data dikatakan normal. Sebaliknya jika nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.
- 2) Uji Autokorelasi untuk menguji tentang ada tidaknya permasalahan autokorelasi yaitu adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ pada persamaan regresi linear. Adanya korelasi menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Salah satu cara

untuk meneteksi autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson. Apabila nilai DW adalah sebesar $du < dw < 4-du$ maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

- 3) Uji Heteroskedastisitas untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas yang menunjukkan adanya ketidaksamaan varian variabel untuk semua pengamatan. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *Scatterplot*. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ietje, 2001).

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis satu sampai dengan hipotesis lima, digunakan uji Chow yang merupakan alat untuk menguji kesamaan koefisien yang ditmukan oleh Gregory Chow.. Uji Chow dapat dilakukan apabila peneliti mempunyai hasil observasi dari suatu regresi yang dapat dikelompokkan menjadi dua atau lebih. Langkah-langkah uji chow adalah sebagai berikut: (Gujarati, 1999)

- Melakukan regresi dengan observasi total periode anggaran (1997/1998-2004) sebelum dan sesudah otonomi daerah untuk didapatkan nilai RSS_1 .
- Melakukan regresi pada data sebelum periode otonomi daerah (1997/1998-2000/2001) untuk didapatkan nilai RSS_2 .
- Melakukan regresi pada data sesudah periode otonomi daerah (2001-2004), untuk didapatkan nilai RSS_3 .
- Melakukan perhitungan nilai RSS_4 . $RSS_4 = RSS_2 + RSS_3$

- Melakukan perhitungan nilai RSS_5 . $RSS_5 = RSS_1 - RSS_4$

- Melakukan pengujian F test:

$$F_{hitung} = \frac{RSS_5/k}{RSS_4/(N_1 + N_2 - 2k)}$$

Dimana:

RSS = sum of square residual

k = banyaknya parameter yang ditaksir

N_1 = Jumlahobservasi periode sebelum otonomi daerah

N_2 = Jumlah observasi periode sesudah otonomi daerah

Nilai F hitung ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel, maka Hipotesis nol dapat ditolak atau hipotesis alternatif diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dari tabel 2 secara deskriptif ditunjukkan perbandingan kondisi setiap variabel antara sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah sebagai berikut: alokasi belanja pelayanan publik mengalami penurunan dari 17% menjadi 12% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemampuan pembiayaan mengalami penurunan dari 105% menjadi 43% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemampuan mobilisasi dana mengalami penurunan dari 34% menjadi 33% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemandirian pemda mengalami penurunan dari 13% menjadi 9% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; tingkat desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari

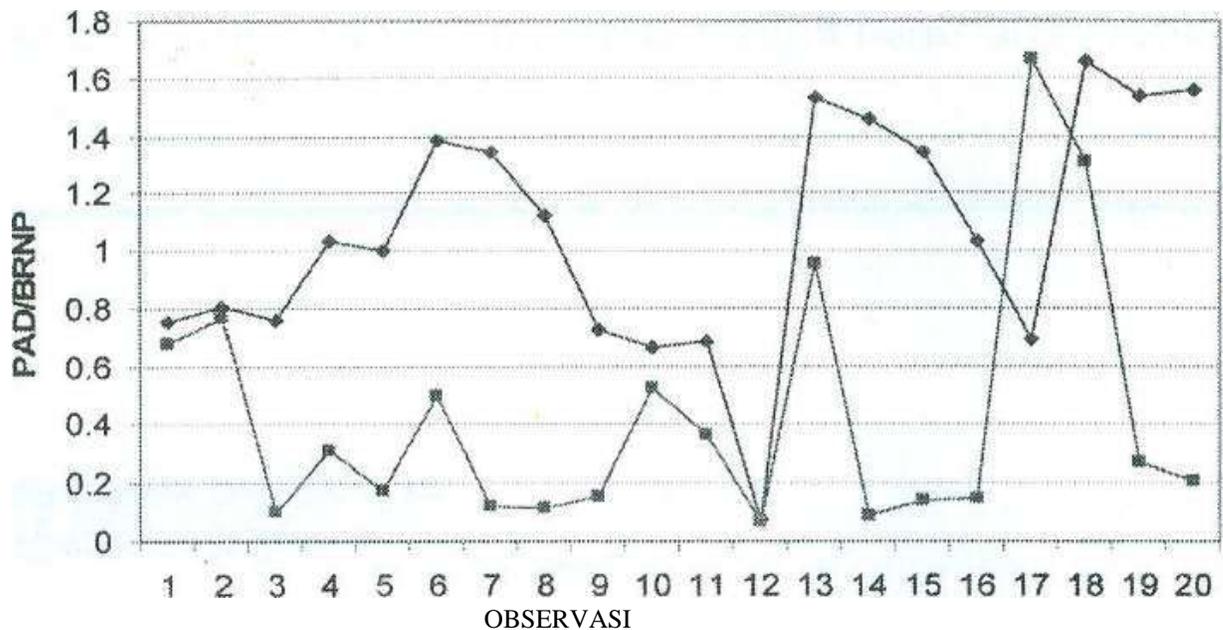
14% menjadi 11% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; dan tingkat *flypaper effect* mengalami kenaikan dari 3% menjadi 4% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan.

Dari semua analisis data secara deskriptif menunjukkan kondisi transisi

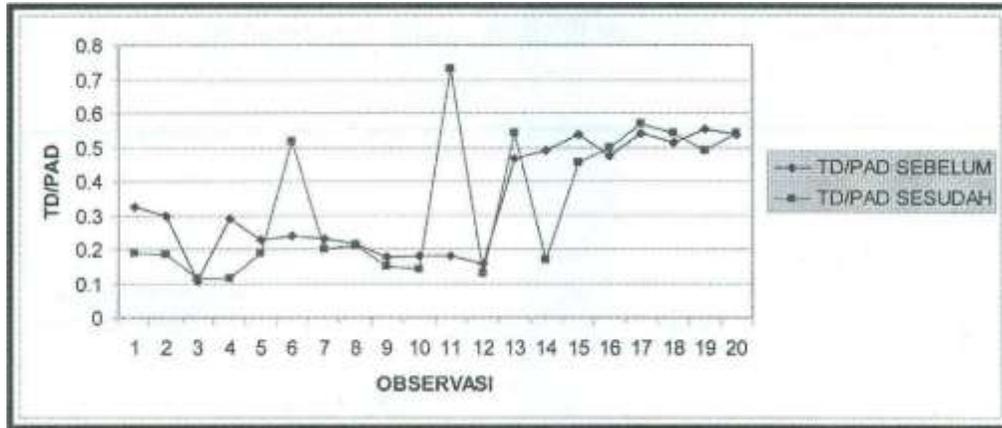
pelaksanaan otonomi daerah yang tidak menguntungkan dan menunjukkan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan efisien. Secara grafts perbandingan kondisi antarvariabel penelitian tersebut dapat dipaparkan pada table 2.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

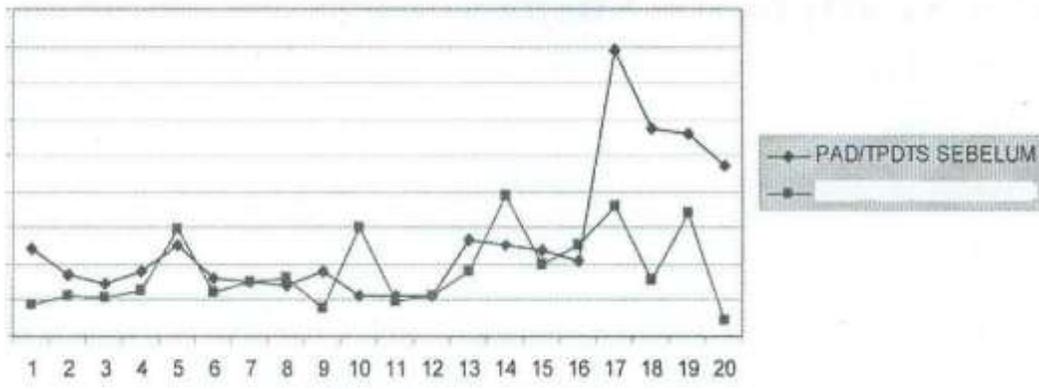
Variabel.	Indikator	Sebelum Otonomi		Sesudah Otonomi		Kondisi
		Mean	Std Dev	Mean	Std Dev	
Alokasi Belanja Pelayanan Publik	BPB/APBD	0,16640	0,036890	0,11920	0,056950	Turun
Kemampuan Pembiayaan	PAD/BRNP	1,05785	0,441805	0,43210	0,413537	Turun
Kemampuan Mobilisasi Dana	TD/PAD	0,33700	0,201863	0,33380	0,157135	Turun
Kemandirian Pemda	PAD/TPDTS	0,13300	0,051660	0,09175	0,092612	Turun
Tingkat Desentralisasi Fiskal	PAD/TPD	0,14135	0,101139	0,11180	0,069559	Turun
Tingkat <i>Flypaper Effect</i>	DAU/PAD	5,03340	3,963149	8,93680	2,674329	Naik



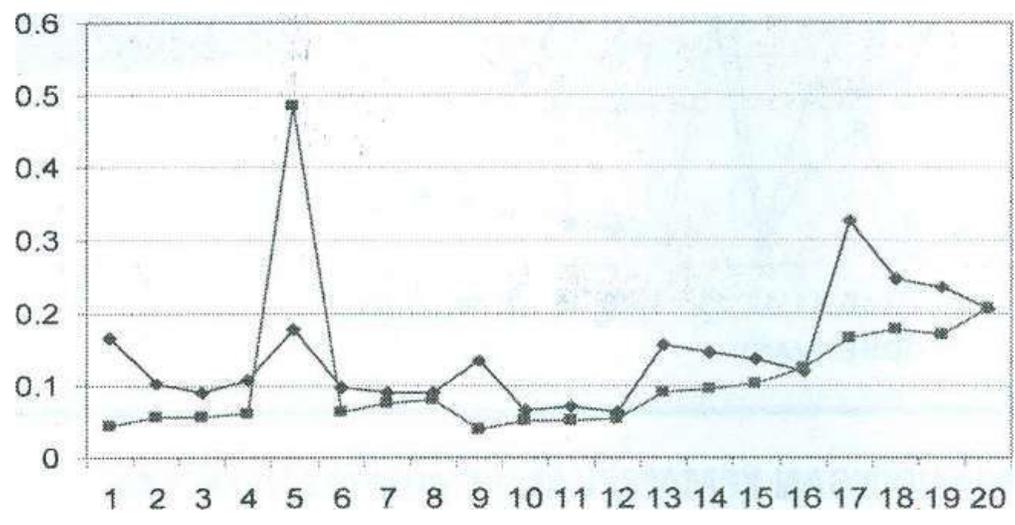
Gambar 1. Perbandingan Kemampuan Pembiayaan Daerah



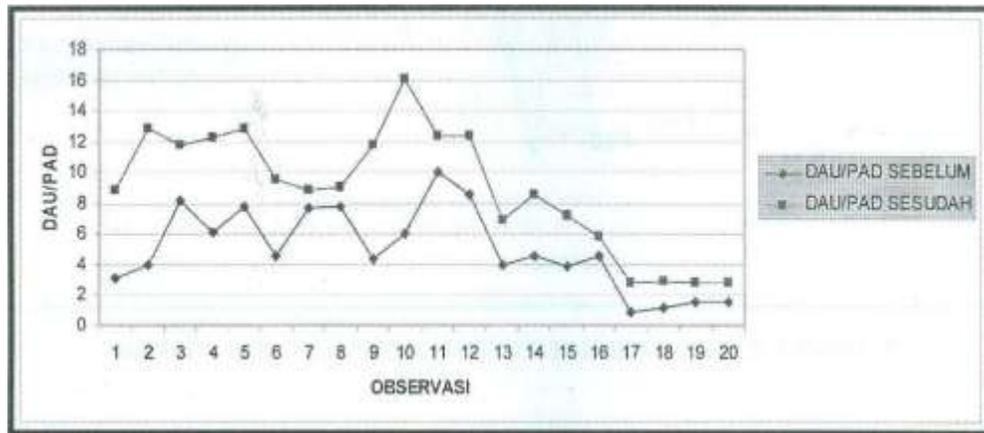
Gambar 2. Perbandingan Kemampuan Mobilisasi Dana Daerah



Gambar 3. Perbandingan Kemandirian Pemerintah Daerah



Gambar 4. Perbandingan Tingkat Desentrausasi Fiskal Daerah



Gambar 5. Perbandingan Tingkat Flypaper Effect

Dilihat dari gambar 1 di atas terlihat bahwa kemampuan pembiayaan daerah setelah otonomi daerah relatif lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah.

Dilihat dari gambar 2 di atas, mobilisasi dana daerah sebelum otonomi daerah mengalami peningkatan yang stabil sedangkan sesudah otonomi daerah mengalami fluktuasi (kadang naik, kadang turun) yang cukup tajam, dengan nilai rata-rata yang relatif sama.

Gambar 3 menunjukkan adanya penurunan tingkat kemandirian pemerintah daerah setelah otonomi daerah.

Gambar 4 menunjukkan desentralisasi fiskal mengalami penurunan setelah adanya otonomi daerah. Gambar 5 menunjukkan

bahwa terjadi kenaikan *flypaper effect* setelah otonomi daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)*. disajikan pada tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh pada variabel alokasi belanja pelayanan publik; kemampuan pembiayaan; kemampuan mobilisasi dana; kemandirian pemda; tingkat desentralisasi fiskal; dan tingkat *flypaper effect* masing-masing $> 0,05$ yang menunjukkan bahwa semua data pada setiap variabel yang diteliti berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

Variabel	KSZ Unstandardized Residual	Sign.	Keterangan
BPB/APBD	0,625	0,830	Normal
PAD/BRNP	0,772	0,590	Normal
TD/PAD	1,287	0,073	Normal
PAD/TPDTS	1,167	0,131	Normal
PAD/TPD	1,048	0,222	Normal
DAU/PAD	0,820	0,512	Normal

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

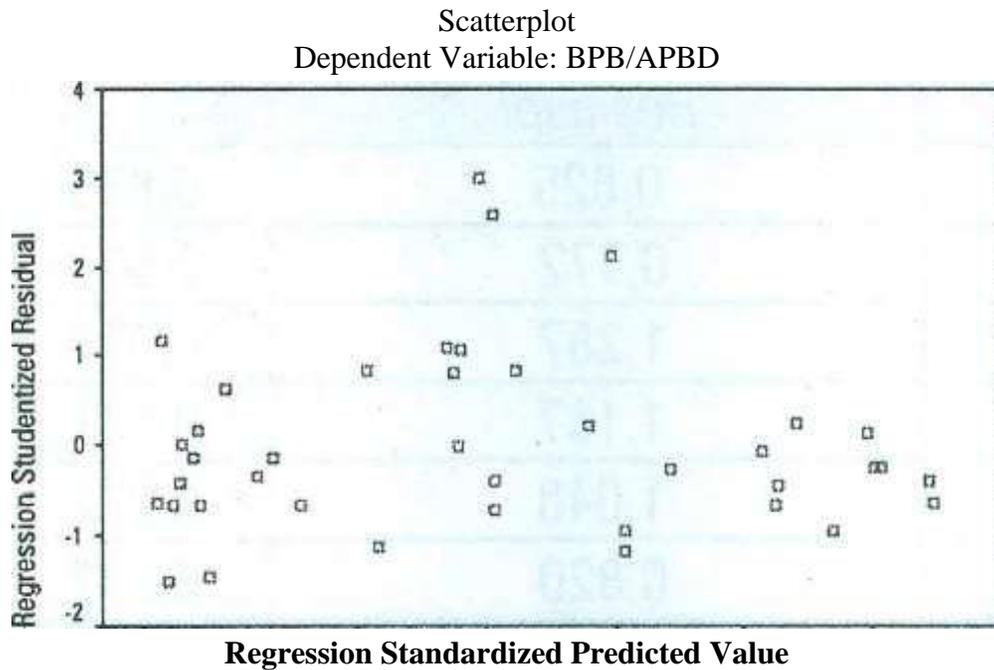
Persamaan	DW-Test	dU	4-dU	Keterangan
Pengaruh PAD/BRNP terhadap BPB/APBD	1,594	1,54	2,46	Non autokorelasi
Pengaruh TD/PAD terhadap BPB/APBD	1,612	1,54	2,46	Non autokorelasi
Pengaruh PAD/TPDS terhadap BPB/APBD	1,679	1,54	2,46	Non autokorelasi
Pengaruh PAD/TPD terhadap BPB/APBD	1,696	1,54	2,46	Non autokorelasi
Pengaruh DAU/PAD terhadap BPB/APBD	1,590	1,54	2,46	Non autokorelasi

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson disajikan pada tabel 4. Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai DW-test pada masing-masing persamaan regresi berada pada daerah $du < dw < 4-du$, artinya tidak ada autokorelasi baik autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* $zntzxa$. Dari grafik *scatterplot* (lihat gambar 6) dapat disimak bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang dibangun. Dengan demikian semua asumsi klasik terpenuhi, dan data dapat dipergunakan untuk tahap selanjutnya, yakni pengujian hipotesis.



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Chow untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien.

Uji Hipotesis Pertama (H_1)

Pengujian hipotesis pertama (H_1) dimaksudkan untuk mengetahui apakah otonomi daerah memiliki peran pada hub-

ungan antara kemampuan pembiayaan dengan alokasi belanja publik dengan melihat ada tidaknya perbedaan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis pertama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Regresi Pengaruh Kemampuan Pembiayaan Terhadap Alokasi Belanja Publik

Variabel	Sebelum Otonomi		Setelah Otonomi	
	Koef. B	Sig.	Koef.B	Sig.
Konstanta PAD/BRNP	0,221 -0,052	0,000**	0,103 0,038	0,000** 0,046*
R ²	0,140 2,927 0,104		0,203 4,585	
F Statistic				
Prob (F-stat)	0,046*			

Tabel 5 memperlihatkan bahwa kemampuan pembiayaan daerah sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar

0,104 > 0,05. Setelah pelaksanaan otonomi daerah kemampuan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,046 < 0,05.

Hasil perhitungan RSS,:

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.007	1	.007	2.425	.128'
Residual	.103	38	.003		
Total	.110	39			

a. Predictors: (Constant), PAD/BRNP

b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₂:

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.009	1	.009	2.927	.104 ^a
Residual	.053	18	.003		
Total	.062	19			

^a. Predictors: (Constant), PAD/BRNP

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₃:

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.005	1	.005	4.585	.046 ^a
Residual	.021	18	.001		
Total	.026	19			

^a. Predictors: (Constant), PAD/BRNP

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

$$RSS_4 = RSS_2 + RSS_3$$

$$= 0,053 + 0,021$$

$$= 0,074$$

$$RSS_5 = RSS_1 + RSS_4$$

$$= 0,103 - 0,074$$

$$= 0,029$$

Sehingga hasilnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{RSS_5/k}{RSS_4 / N_1 + N_2 - 2k}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,029 / 2}{0,074/20 + 20 - 2(2)}$$

$$= 7,054$$

Nilai F_{hitung} yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 7,054 lebih besar dari F_{tabel} 3,23 (df₁ = 2; df₂ = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapat perbedaan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap alokasi belanja

pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana sebelum otonomi daerah tidak berpengaruh sedangkan setelah otonomi daerah kemampuan pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pelayanan publik.

Uji Hipotesis Kedua (H₂)

Pengujian hipotesis kedua (H_j) dimaksudkan untuk mengetahui apakah otonomi daerah memiliki peran pada pengaruh kemampuan mobilisasi dana daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik dengan melihat apakah terdapat perbedaan pengaruh kemampuan mobilisasi daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis kedua disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Regresi Pengaruh Kemampuan Mobilisasi Dana Terhadap Alokasi Belanja Publik

Variabel	Sebelum Otonomi		Sesudah Otonomi	
	Koef. B	Sig.	Koef. B	Sig.
Konstanta	0,196	0,000**	0,091	0,000**
TD/PAD	-0,089	0,295	0,085	0,038*
R ²	0,061		0,219	
F Statistic	1,161		5,035	
Prob (F-stat)	0,295		0,038*	

Sumber: data diolah

Tabel 6 memperlihatkan bahwa kemampuan mobilisasi dana daerah sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0,295 > 0,05$. Sesudah

pelaksanaan otonomi daerah kemampuan mobilisasi dana daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0,038 < 0,05$.

Hasil perhitungan RSS₁:

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.001	1	.001	.186	.668 ^a
Residual	.109	38	.003		
Total	.110	39			

^a. Predictors: (Constant), TD/PAD

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₂:

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.004	1	.004	1.161	.295 ^a
Residual	.058	18	.003		
Total	.062	19			

^a. Predictors: (Constant), TD/PAD

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₃:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.006	1	.006	5.035	.038 ^a
Residual	.020	18	.001		
Total	.026	19			

^a. Predictors: (Constant), TD/PAD

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

$$\begin{aligned} \text{RSS}_4 &= \text{RSS}_2 + \text{RSS}_3 \\ &= 0,058 + 0,020 \\ &= 0,078 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RSS}_5 &= \text{RSS}_1 + \text{RSS}_4 \\ &= 0,109 - 0,078 \\ &= 0,031 \end{aligned}$$

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{\text{hitung}} &= \frac{\text{RSS}_5/k}{\text{RSS}_4 / N_1 + N_2 - 2k} \\ &= \frac{0,031 / 2}{0,078/20 + 20 - 2(2)} \\ &= 7,154 \end{aligned}$$

Nilai F_{hitung} yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 7,154 lebih besar dari F_{abd} 3,23 (df₁ = 2; df₂ = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau ter-

dapat perbedaan pengaruh kemampuan mobilisasi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana sebelum otonomi daerah tidak ada pengaruh sedangkan setelah otonomi daerah ada pengaruh mobilisasi dana daerah terhadap alokasi belanja publik dengan arah yang positif.

Uji Hipotesis Ketiga (H₃)

Pengujian hipotesis ketiga (H₃) dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh kemandirian pemda terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis ketiga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.
Hasil Regresi Pengaruh Tingkat Kemandirian Pemda terhadap Alokasi Belanja Publik

Variabel	Sebelum Otonomi		Setelah Otonomi	
	Koef. B	Sig.	Koef. B	Sig.
Konstanta	0,164	0,000**	0,149	0,000**
PAD/TPDTS	0,021	0,884	-0,321	0,046*
R ²	0,001		0,203	
F Statistic	0,022		4,574	
Prob (F-stat)	0,884		0,046*	

Tabel 7 memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sebelum pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0,884 > 0,05$. Sesudah

pelaksanaan otonomi daerah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja publik daerah, ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar $0,046 < 0,05$.

Hasil perhitungan RSS₁:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.000	1	.000	.067	.798 ^a
Residual	.110	38	.003		
Total	.110	39			

^a. Predictors: (Constant), PAD/TPOTS

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₂:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.000	1	.000	.022	.884 ^a
Residual	.062	18	.003		
Total	.062	19			

^a. Predictors: (Constant), PAD/TPDTS

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₃:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.005	1	.005	4.574	.046 ^a
Residual	.021	18	.001		
Total	.026	19			

^a. Predictors: (Constant), PAD/TPDTS

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

$$\begin{aligned} \text{RSS}_4 &= \text{RSS}_2 + \text{RSS}_3 \\ &= 0,062 + 0,021 \\ &= 0,083 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RSS}_5 &= \text{RSS}_1 + \text{RSS}_4 \\ &= 0,110 - 0,083 \\ &= 0,027 \end{aligned}$$

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{RSS}_5/k}{\text{RSS}_4 / (N_1 + N_2 - 2k)}$$

$$F_{\text{hitung}} = \frac{0,027 / 2}{0,083/20 + 20 - 2(2)} = 5,855$$

Nilai F_{hitung} yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 5,855 lebih besar dari $F_{\text{tabel}} 3,23$ ($df_1 = 2$; $df_2 = 20+20-4$), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau ter-

dapat perbedaan tingkat pengaruh ke-
mandirian pemda terhadap alokasi belanja
pelayanan publik antara sebelum dan sesudah
otonomi daerah dimana sebelum otonomi
tidak berpengaruh dan sesudah otonomi ber-
pengaruh negatif signifikan.

Uji Hipotesis Keempat (H₄)

Pengujian hipotesis keempat (H₄) dimak-
sudkan untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan pengaruh tingkat desentralisasi
fiskal terhadap alokasi belanja pelayanan
publik antara sebelum dan sesudah otonomi
daerah. Ringkasan hasil perhitungan regresi
untuk pengujian hipotesis keempat disajikan
pada tabel berikut:

Tabel 8.
**Hasil Perhitungan Regresi Pengaruh Tingkat Desentralisasi Fiskal Terhadap
Alokasi Belanja Pelayanan Publik**

Variabel	Sebelum otonomi		Setelah otonomi	
	Koef. B	Sig.	Koef. B	Sig.
Konstanta	0,146	0,000**	0,128	0,000**
PAD/TPD	0,143	0,461	-0,083	0,336
R ²	0,031		0,051	
F Statistic	0,567		0,977	
Prob (F-stat)	0,461		0,336	

Tabel 8 memperlihatkan bahwa tingkat
desentralisasi fiskal sebelum pelaksanaan
otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap alokasi belanja pelayanan publik,
ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar
0,461 > 0,05. Sesudah pelaksanaan otonomi
daerah, desentralisasi fiskal juga tidak ber-
pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja
pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai
p-value sebesar 0,336 > 0,05. Karena kedua
koefisien regresi tersebut tidak signifikan,
dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah

tidak berhubungan dengan pengaruh desen-
tralisasi fiskal terhadap alokasi belanja pela-
yanan publik.

Uji Hipotesis Kelima (H₅)

Pengujian hipotesis kelima (H₅) di-
maksudkan untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan pengaruh tingkat *flypaper effect*
terhadap alokasi belanja pelayanan publik
antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
Ringkasan hasil perhitungan regresi untuk

pengujian hipotesis kelima disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.
Hasil Perhitungan Regresi Pengaruh Tingkat *Flypaper Effect* terhadap Alokasi Belanja Pelayanan Publik

Variabel	Sebelum otonomi		Sesudah otonomi	
	Koef. B	Sig.	Koef. B	Sig.
Konstanta	0,181	0,000**	0,161	0,000**
DAU/PAD	-0,003	0,575	-0,005	0,024*
R ²	0,018		0,254	
F Statistic	0,327		6,113	
Prob (F-stat)	0,575		0,024*	

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat *flypaper effect* sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,575 Hasil perhitungan RSS₁:

> 0,05. Sesudah pelaksanaan otonomi daerah, tingkat *flypaper effect* berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang ditunjukkan dengan nilai *p-value* sebesar 0,024 < 0,05.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.022	1	.022	9.759	.003 ^a
Residual	.087	38	.002		
Total	.110	39			

^a. Predictors: (Constant), DAU/PAD

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₂:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.001	1	.001	.327	.575 ^a
Residual	.061	18	.003		
Total	.062	19			

^a. Predictors: (Constant), DAU/PAD

^b. Dependent Variable: BPB/APBD

Hasil perhitungan RSS₃:

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.007	1	.007	6.113	.024 ^a
Residual	.019	18	.001		
Total	.026	19			

^a Predictors: (Constant), DAU/PAD

^b Dependent Variable: BPB/APBD

$$\begin{aligned} \text{RSS}_4 &= \text{RSS}_2 + \text{RSS}_3 \\ &= 0,061 + 0,019 \\ &= 0,080 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RSS}_5 &= \text{RSS}_1 + \text{RSS}_4 \\ &= 0,087 - 0,080 \\ &= 0,007 \end{aligned}$$

Sehingga hesarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{RSS}_5/k}{\text{RSS}_4 / N_1 + N_2 - 2k}$$

$$F_{\text{hitung}} = \frac{0,080 / 2}{0,007/20 + 20 - 2(2)}$$

$$= 20,571$$

Nilai F_{hitung} yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 20,571 lebih besar dari F_{tabel} 3,23 ($df_1 = 2$; $df_2 = 20+20-4$), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapat perbedaan pengaruh *flypaper effect* terhadap alokasi belanja publik dimana sebelum otonomi daerah tingkat *flypaper effect* tidak berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik dan setelah otonomi daerah tingkat *flypaper effect* berpengaruh negatif signifikan pada alokasi belanja pelayanan publik.

Pembahasan

Dari hasil temuan statistik deskriptif ditunjukkan bahwa kondisi setiap variabel mengalami perkembangan kondisi yang tidak

menguntungkan pada perpindahan era dari era sentralisasi ke era otonomi daerah hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan strategi pengelolaan keuangan daerah pada saat awal-awal penerapan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak siap untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan, meningkatkan kemampuan mobilisasi dana, meningkatkan kemandirian daerah, mewujudkan desentralisasi fiskal, dan menurunkan tingkat *flypaper effect*.

Lebih dari tiga puluh tahun pemerintah daerah berada dalam kondisi sentralisasi, semua aspek pembangunan daerah lebih cenderung ditentukan oleh pemerintah pusat, cukup wajar apabila empat tahun setelah penerapan otonomi daerah dari sisi sistem maupun dari sisi personil belum siap mewujudkan cita-cita otonomi daerah. Pada tahun 2000 mulai berlaku sistem otonomi daerah dan pada aspek pengelolaan keuangan diatur menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan secara teknis diatur menggunakan Keputusan Menteri dalam Negeri no 29 tahun 2009. Cukup wajar bahwa ketidaksiapan otonomi daerah juga didukung peraturan perundangan yang baru saja berlaku diterapkan. Personil masih menyesuaikan dengan sistem yang

dibangun dimana sistem tersebut juga masih dalam tahap validasi dalam penerapannya.

Temuan secara statistik induktif ditunjukkan bahwa secara umum penerapan otonomi daerah memiliki peran pengaruh aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah pada pencapaian tujuan pelayanan publik melalui alokasi belanja pelayanan publik. Setelah otonomi daerah, kemampuan pembiayaan daerah yang cenderung merendah semakin memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang relatif merendah pula dibandingkan dengan saat sebelum otonomi daerah. Kemampuan mobilisasi dana daerah yang cenderung merendah semakin memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang cenderung merendah pula dibandingkan dengan saat sebelum otonomi daerah.

Temuan terkait dengan pengaruh kemandirian daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, pengaruh kemandirian daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik memiliki arah negatif. Pada aspek desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik dan otonomi daerah pun juga tidak memiliki peranan pada hubungan ini. Tingkat *flypaper effect* berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik pada setelah otonomi daerah yang menunjukkan bahwa otonomi daerah berperan dalam meningkatkan pengaruh tingkat *flypaper effect* terhadap alokasi belanja pelayanan publik dengan arah yang negatif, yang berarti semakin tinggi tingkat *flypaper effect* maka alokasi belanja modal akan semakin rendah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dengan menggunakan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah penelitian, dapat ditarik kesimpulan pertama, terjadi ketidaksiapan baik dari aspek penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah maupun pada aspek personilnya dalam melaksanakan pelayanan publik pada era transisi otonomi daerah. Kedua, cukup wajar apabila temuan pada poin 1 terjadi karena pada masa tersebut adalah masa transisi pelaksanaan otonomi daerah setelah lebih dari 30 tahun pemerintah daerah menggunakan sistem terdesentralisasi. Ketiga, secara umum pada pengaruh kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi dana, kemandirian pemda, dan tingkat *flypaper effect*, otonomi daerah memiliki peran untuk memperkuat atau menciptakan pengaruh tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran yang pertama, pemerintah perlu meneruskan kebijakan otonomi daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. Kedua, aspek sistem dan aspek personil harus semakin dimantapkan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah tersebut mengingat ada beberapa temuan dimana otonomi daerah tidak memiliki peran dalam meningkatkan atau memunculkan pengaruh aspek pengelolaan keuangan daerah terhadap pelayanan publik melalui alokasi belanja pelayanan publik. Terakhir, perlu ada perluasan obyek penelitian di luar DIY dan waktu penelitian yang semakin panjang horizon waktunya untuk mencapai hasil penelitian yang semakin menunjukkan fenomena, bersifat general dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H., 2001, "Analisis Deskriptif Pengaruh *Fiscal Stress* Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah", *Kompak*, Nomor 2.
- _____, 2001, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Agus T. B., 2004, "Analisis Kebijakan APBD Dari aspek Implementasi Diberlakukan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemkot Yogyakarta DIY 1992-2002)", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 5 No 2.
- Bambang H., 2002, "Analisis Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)", *Simposium Nasional Akuntansi 5*, Semarang.
- Elfi E., 2001, "Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Thesis Pascasarjana*, Universitas Gadjah Mada.
- Gideon Tri B. S., 2007, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah", *Konferensi Penelitian*. Surabaya.
- Gujarati, 1999, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Haryo K., 2007, "Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- _____, 2007, "Kajian Ekonomi Politik Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *Makalah*.
- Hidayat, 2001, "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat", *Thesis Pascasarjana*, Universitas Gadjah Mada.
- Ietje N., __, *Modul Praktikum Statistika*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indra B., 2001, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Izzah M., 2000, "Kesiapan Daerah Tingkat II Di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Implementasi UU No. 25 Tahun 1999", *Thesis Pascasarjana*, Universitas Gadjah Mada.
- Kesit B. P., 2004, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Volume 8.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

_____, 2002, *Perpajakan*, Edisi Refisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mutiara M., 2006, "*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera", *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang.

Novi H., 2005, "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Dalam Menunjang Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pada Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

STAN, 2007. Modul Program Pendidikan Non Gelar Sudit Sektor Publik.

Tumilaar R. L, 1 997, "Otonomi Keuangan Dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara", Thesis Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yohanes H., 2007, "Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah", *Konferensi Penelitian*, Surabaya.